

Pimpinan Perusahaan Terlapor Kasus KDRT Penuhi Panggilan Polres Jaksel

JAKARTA (IM) - Terlapor kasus penganiayaan anak berinisial RIS memenuhi panggilan kedua oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Selatan. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan terlapor RIS sebelumnya viral di media sosial.

"Hari ini panggilan kedua, sudah hadir untuk terlapor. Jadi, sudah ada bersama penyidik," ujar Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi di Jakarta, Kamis (5/1).

Lebih lanjut Nurma menjelaskan bahwa terlapor akan diminta keterangan untuk memperjelas terkait kasus penganiayaan yang dilakukan olehnya. Menurut Nurma, penyidik telah menyiapkan 25 pertanyaan guna memperjelas kasus.

Namun, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan jumlah pertanyaan bertambah untuk keterangan lebih lanjut.

"Jadi, semua kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan itu yang kita tanyakan untuk memperjelas kasus yang dilaporkan," tambah Nurma.

Mengenai dugaan adanya kendala dalam memproses kasus ini, Nurma mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada.

"Kalau kendala tidak ada, yang jelas pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, itu adalah kewajiban oleh penyidik," ujarnya.

Nurma mengatakan terlapor yang telah mendapatkan panggilan untuk kedua kalinya itu sudah berada di Polres pada pukul 11.00 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya. Polrestro Jakarta Selatan (Jaksel) menindaklanjuti kasus dugaan KDRT yang melibatkan seorang pimpinan perusahaan berinisial RIS.

Tempat kejadian perkara (TKP) kasus ini yakni Apartemen Signature Park Jalan Letjen MT Haryono Kav 22-23 Tebet, Jakarta Selatan. Kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian dengan surat laporan kepolisian bernomor LP/2301/IX/2022/RJS pada Jumat 23 September 2022 jam 19.00 WIB.

Pasal yang disangkakan kepada terlapor mengenai kekerasan terhadap anak dan KDRT serta perbuatan tidak menyenangkan dengan kekerasan yakni Pasal 76C Jo 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Jo Pasal 335 KUHP tentang Penghapusan KDRT. ● lus

FOTO: ANTARA



DIDUGA TERKAIT KASUS MUTILASI DI BEKASI

Polisi Bongkar Makam Anna Laksita di TPU Kampung Kandang

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, pembongkaran makam ini dilakukan untuk memastikan identitas jasad korban.

JAKARTA (IM) - Polisi membongkar salah satu makam yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (5/1)

siang. Berdasarkan pantauan di lokasi, pukul 14.03 WIB, proses pembongkaran makam tersebut masih berlangsung.

Proses pembongkaran makam itu dilakukan secara tertutup dengan kain berwarna putih yang diikat pada tiang-tiang tenda. Makam yang dibongkar itu diketahui makam Anna Laksita Leialoha. Se-

jumlah keluarga almarhumah tampak hadir menyaksikan pembongkaran makam.

Beberapa anggota keluarga mengelilingi sekitar tenda yang ditutupi kain putih. Di sisi lain, tampak pembongkaran makam itu dijaga ketat oleh polisi. Sejumlah polisi tersebut terlihat berjaga di luar tenda. Mereka mengawasi dan melarang awak media yang mendekat.

Tak jauh dari makam yang dibongkar, terdapat satu ambulans. Lokasinya terparkir tepat di depan mobil pick up. Adapun pembongkaran makam ini diduga berkaitan dengan kasus mutilasi terhadap seorang perempuan oleh pria bernama M Ecky Listiantho (34).

Ecky telah ditangkap oleh Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya bersamaan dengan penemuan potongan jasad korban di salah satu kontrakan di Tambun, Kabupaten Bekasi.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, pembongkaran makam ini dilakukan untuk memastikan identitas jasad korban. "Saat ini sedang melakukan pemeriksaan sero bio molekuler, untuk memastikan identitas mayat," kata Hengki.

Potongan jasad korban ditemukan di kontrakan kawasan Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (29/12), bersamaan penangkapan tersangka. Sebelumnya, Ecky dikabarkan tak kembali ke rumah sejak Jumat (23/12), setelah pamit untuk pergi ke bank, ternyata bukan hilang.

"Langsung (di TKP) kami

memastikan tersangka. Ditemukan dua boks kontainer yang berisikan kantong plastik hitam yang di dalamnya mayat berjenis perempuan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, Jumat (30/12).

Zulpan mengatakan, Ecky ditangkap saat penyidik unit 4 subdit Resmob turun tangan membantu pencarian Ecky yang disebut hilang secara misterius. Penyidik lalu menelusuri kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

"Kami menindaklanjuti laporan orang hilang dari Polsek Bantar Gebang selanjutnya Anggota unit 4 Resmob Polda metro jaya melakukan lidik," kata Zulpan. Sebelumnya, istri dari Ecky, EZ, mengatakan bahwa suaminya tiba-tiba menghilang setelah pamit ke bank.

"Ecky WhatsApp, pamit mau ke bank naik Grab, langsung dibalas tapi cuma ceklis satu (tidak terkirim). Itu tanggal 23 Desember sekitar pukul 09.00 WIB," ujar EZ, Selasa (27/12).

Di hari yang sama, pada pukul 16.00 WIB, keluarga menerima catatan transaksi dari bank mengenai penarikan uang di ATM Mandiri di bilangan Rawalumbu, Bekasi Timur. Catatan transaksi itu didapat EZ saat menghubungi layanan customer service Bank Mandiri. "Jumlah penarikan enggak diinformasikan orang bank, katanya harus ke polisi. Keluarga juga sudah minta (rekaman) CCTV, lagi-lagi enggak bisa karena harus polisi yang minta," jelas EZ. ● lus

FOTO: ANTARA



REKA ULANG KASUS PEMBUNUHAN DI MADIUN Tersangka Ismail Songge (kanan) menjalani reka ulang kasus pembunuhan di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (5/1). Polisi menetapkan Ismail Songge sebagai tersangka pembunuhan Yuli Restiana yang merupakan isteri sirinya karena latar belakang asmara.

Nikita Mirzani Desak Polres Jaksel Penjarakan Dito Mahendra

SERANG (IM) - Nikita Mirzani meminta Polres Jakarta Selatan (Jaksel) memproses kasus dugaan penyekapan yang dilakukan Dito Mahendra dan Nindy Ayunda.

Bahkan, Nikita Mirzani berniat membantu polisi jika kesulitan dalam mencari keberadaan Dito Mahendra. "Kalau mau menangkap buruan tangkap saja pak, kalau bapak mau tahu di mana lokasinya, tanya saja ke saya, saya tahu di mana mereka berada," katanya, Kamis (5/1).

Ia mendukung penuh aparat kepolisian dapat menangani kasus yang menjerat Dito Mahendra dan Nindy Ayunda.

"Sama itu Polres Jaksel, ayo kamu bisa Kapolresnya semoga menangani kasus HAM yang diduga dilakukan oleh Dito Mahendra dan Nindy Ayunda," ungkapnya. Ia menerangkan, aparat

tidak boleh pilih kasih atau pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Mengingat dirinya saja bisa ditahan meski memiliki tiga orang anak.

"Jangan lagi pilih Nindy punya anak, gua juga punya anak dipenjara saja. Anak gua lebih banyak 3, anak ini cuma 2 masih punya bapak. Bapak anak gua sudah pada mampus," jelasnya.

Diketahui, Nikita Mirzani bersengketa dengan Dito Mahendra sejak dilaporkan pencemaran nama baik di media sosial.

Berkat laporan tersebut, Nikita Mirzani harus menjalani proses hukum hingga di persidangan. Bahkan, aktris kondang itu harus meringkuk ditahan di Rutan Serang.

Namun pada 29 Desember 2022, Nikita Mirzani diputuskan bebas oleh hakim akibat Dito Mahendra sebagai saksi tidak pernah hadir di persidangan. ● lus

Polisi Kirim Jaksa Berkas Kasus Anggota DPRD Pandeglang Tersangka Cabul

PANDEGLANG (IM) - Penyidik Sateskrim Polres Pandeglang telah menyerahkan berkas perkara tahap I kasus dugaan pencabulan yang dilakukan anggota DPRD Pandeglang, Yangto. Jaksa hari ini sudah menerima berkas perkara tersebut.

"Hari ini sudah kami terima," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang, Helena Octaviane kepada wartawan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Kamis (5/1).

Helena mengatakan pihak Kejari Pandeglang akan mengkaji berkas perkara tersebut. Berkas perkara akan diteliti selama 7 hari ke depan.

"Berkas itu memang harus kita teliti, jangka waktu penelitian 7 hari, dalam penelitian itu akan ditunjukkan usurnya terbukti atau tidak, atau ada kekurangan," katanya.

Jika berkas itu sudah dikaji dan diteliti, jaksa akan

segera menentukan sikap apakah berkas itu sudah dinyatakan lengkap atau tidak. Helena mengatakan, jika berkas tahap I sudah lengkap, selanjutnya polisi harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa.

"Tujuh hari penentuan sikap apakah itu kembali penyidik atau kita nyatakan P21, kalau kembali harus dilengkapi lagi. Kalau sudah lengkap, mereka harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti," terangnya.

Sebelumnya, penyidik Sateskrim Polres Pandeglang akan segera melimpahkan berkas perkara tersangka anggota DPRD Pandeglang, Yangto. Yangto diduga mencabuli seorang perempuan.

"Menunggu pelimpahan berkas ke kejaksaan," kata Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Shilton saat diminta konfirmasi, Rabu (28/12). ● lus

Bayar SIM Pakai Sampah Sudah Efektif di Polres Cirebon

CIREBON (IM) - Inovasi Polresta Cirebon mengganti biaya pembuatan SIM dengan sampah cukup efektif. Terbukti, setelah 5 bulan berjalan, sampai saat ini sudah ada 49 orang yang sudah membuat SIM dengan modal sampah.

"Dari mulai Agustus 2022, sampai dengan sekarang, tercatat sudah ada 49 orang yang membuat SIM pakai bank sampah. Rata-rata mereka dari wilayah Kecamatan Gempol, membuat SIM C," kata Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, melalui Kasi Humas Polresta Cirebon Iptu Moch. Fadholi, Kamis (5/1).

Menurutnya, tidak ada istimewa membuat SIM menggunakan bank sampah maupun secara umum. Prosesnya tetap sama, sesuai prosedur. Yakni, menyedi-

akan foto copy KTP, Surat Keterangan Sehat, dan surat dari psikolog. Kemudian mendaftar ke pelayanan SIM Polresta Cirebon.

Namun, kelebihan membuat SIM dengan bank sampah, tidak lagi membayar ke bank BRI alias gratis. Karena bayar bank BRI sudah digantikan dengan sampah yang dikumpulkan oleh pemohon, yang sudah kerjasama dengan DLH.

"Jadi kita sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon. Pemohon SIM nanti kordinasi dengan DLH, kalau tabungan sampah sudah cukup, akan diberikan surat rekomendasi dari DLH. Surat rekomendasi menyatakan nasabah sudah memenuhi syarat bikin SIM," Ungkapnya.

Dia menyebutkan, setiap

minggunya yang membuat SIM pakai bank sampah terus ada. Karena, di Kabupaten Cirebon ada 10 bank sampah yang kerjasama dengan DLH dan juga Polresta Cirebon.

"Nasabah bank sampah, tidak hanya dapat pelayanan SIM saja. Tabungan sampah juga bisa digunakan untuk membuat SKCK dan pelayanan kepolisian lainnya di Polresta Cirebon," jelasnya.

Terpisah, Ayu Angraeni warga Desa Kedungbunder, Kecamatan Gempol mengapresiasi pelayanan dari Polresta Cirebon. Menurutnya, inovasi tersebut mempermudah masyarakat menerima pelayanan. "Bikin SIM melalui bank sampah Polresta memberikan kemudahan dengan tes ujian praktek dan teori. Saya lulus mendapatkan SIM C," tukasnya. ● lus

Polisi Mulai Lakukan Tilang ETLE di Kota Tangerang, Simak Lokasinya!



Kapolres Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho (kedua dari kiri) mengatakan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE ini untuk mengatasi peningkatan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

TANGERANG (IM) - Polres Metro Tangerang Kota mulai melakukan penegakan disiplin berlalu lintas melalui sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis Kamis (5/1), melalui uji coba dalam 3 hari kedepan.

Kamera tilang ETLE tersebut sudah terpasang di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten.

Kapolres Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE ini untuk mengatasi peningka-

tan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota mulai diujicobakan hari ini, Kamis 5 Januari 2023 dan tilang akan berlaku mulai Senin, 9 Januari 2023.

"4 ETLE statis di tempatkan pada lokasi-lokasi tinggi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, salah satunya saat ini sudah terpasang di Jalan Daan Mogot, tepatnya di depan restoran cepat saji McD, yang mulai kita ujicoba hari ini," kata Zain. Kamis (5/1).

Zain pun menjelaskan, selain 4 ETLE statis ada 1 ETLE Portabel yang dapat

dipindahkan sewaktu-waktu oleh petugas dan 1 ETLE mobile bergerak ke lokasi-lokasi yang mempunyai kerawanan lalu lintas tinggi.

"Diharapkan kedepannya keberadaan ETLE ini benar benar membantu kita dalam membuat tertib masyarakat dalam berlalulintas," ujarnya.

Kapolres berpesan kepada masyarakat, mulai saat ini dan kedepan, ada atau tidak ada petugas untuk tetap tertib berlalu lintas. "Ini demi keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya," tandas Zain. ● joh

RILIS KASUS KORUPSI TANAH PEMERINTAH

Anggota Ditreskrimus Polda Jabar menggiring sejumlah tersangka saat gelar perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah milik pemerintah di Mapolda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/1). Ditreskrimus Polda Jabar berhasil menangkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pemindahtanganan tanah milik pemerintah menjadi milik pribadi di kawasan Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat oleh empat tersangka dari aparat desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp30 miliar lebih.

Polda Jabar Rotasi Sejumlah Kapolres

BANDUNG (IM) - Polda Jabar melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah Kapolres di beberapa Polres di Jawa Barat.

Serah terima jabatan Kapolres tersebut, dilakukan di Mapolda Jabar, Kamis (5/1). Serah terima jabatan para Kapolres tersebut, dipimpin langsung Kapolda Jabar, Irijen Pol Suntana.

Ada tujuh Kapolres di Polda Jabar, yang mengalami rotasi jabatan. Salah satu AKBP Marully Pardeede yang sebelumnya menjabat Kasubdit Ditreskrimus Polda Jabar, mendapat promosi menjabat Kapolres Sukabumi, menggantikan AKBP Dedy Darmawansyah.

Lalu AKBP Ariel Indra Sentanu menggantikan AKBP M. Fahri Anggia Natua Siregar Kota.

Kemudian, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang menjabat Kapolresta Bogor, digantikan Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.

Lalu AKBP Imron Ermawan, sebagai Kapolres Cimahi, digantikan AKBP Aldi Subartono. Sementara Kapolres Garut kini dijabat AKBP Rio Wahyu Anggoro. Jabatan Kapolres Indramayu yang dijabat AKBP Mokhammad Luk-

man Syarif, kini diserahkan ke AKBP M. Fahri Anggia Natua Siregar.

Selain jabatan Kapolres yang mengalami rotasi, ada juga rotasi jabatan para pejabat utama Polda Jabar.

Seperti Brigjen Pol Stephen M. Napiun yang sebelumnya menjabat Karo Opa Polda Jabar, kini diserahkan ke Kombes Pol Drs. Budi Wasono.

Lalu Brigjen Pol Ruslan Ependi, yang sebelumnya menjabat Dirintelkam Polda Jabar, jabatannya diserahkan ke Kombes Pol Asep Nalaludin.

Kemudian Kombes Pol Slamet Setiono, yang sebelumnya menjabat Karolog Polda Jabar, dijabat Kombes Pol Dr. Yasir.

Lalu Kombes Pol Rommin Thaib, yang sebelumnya menjabat Dir Lantas Polda Jabar, jabatannya diserahkan ke Kombes Pol Wibowo.

Setelah itu, Kombes Pol Arnapi, yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Jabar memberikan jabatannya ke Kombes Pol Made Sukawijaya.

Terakhir Kombes Pol Tony Binsar, yang sebelumnya menjabat Kabidkum Polda Jabar, menyerahkan jabatannya ke Kombes Pol Wahyu Wim Hardjanto. ● lus